

Minta Solmadapar Tunjuk Hidung Mafia Anggaran

PONTIANAK-Aksi demonstrasi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) yang mengusung isu mafia anggaran beberapa hari lalu di Gedung DPRD Kalbar masih berujung panjang.

Salah seorang Anggota Fraksi PDIP Krisantus Kurniawan kembali menegaskan bahwa tidak ada mafia anggaran di DPRD Kalbar. Ia bahkan menantang para aktivis

mahasiswa tersebut untuk menunjuk hidung oknum dewan yang diduga sebagai mafia anggaran.

"Siapa orangnya, tunjukkan. Kalau mau membuktikan kebenaran, jangan takut!" katanya kemarin. Sepengetahuan Krisantus, selama ini tidak ada praktik mafia anggaran di DPRD Kalbar. Di lembaga ini hanya terdapat

• ke halaman 15 kolom 2

Minta Solmadapar Tunjuk Hidung Mafia ...

Sambungan dari halaman 9

Badan Anggaran. "Kalau memang ada oknum Badan Anggaran yang main mata dan segala macam, tunjukkan! Adili secara hukum," tantangnya.

Di sisi lain, Krisantus juga menyatakan keberatan dengan aksi Solmadapar tersebut yang dipandang kurang santun. Terlebih lagi dengan adanya bahasa "Gubernur Zinahi DPRD Lahirkan Mafia Anggaran" sebagaimana dilontarkan dalam pernyataan sikap ketika aksi berlangsung. Menurut Krisantus, kata-kata itu cenderung mendiskreditkan seseorang dan tidak pantas disampaikan oleh elemen mahasiswa.

Ia menyarankan agar ke depan, Solmadapar lebih santun serta dapat memberi saran-saran yang konstruktif. Apabila aspirasi yang disampaikan menggunakan cara-cara santun, menurutnya DPRD tentu akan lebih akomodatif.

"Lain kali jangan menghujat orang seperti itu. Apa

yang mereka maksud dengan gubernur menzinahi DPRD? Tidak pernah ada gubernur menzinahi DPRD! DPRD pun tidak merasa dizinahi," katanya.

Secara terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar Ary Pudyanti menyatakan terima kasih atas kepedulian Solmadapar yang bersedia melaksanakan demonstrasi. Namun, ia berharap konteks permasalahan yang diusung dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.

Isu yang terjadi di tingkat pusat, menurutnya belum tentu terjadi pula di daerah. Ia pun masih mempertanyakan definisi mafia anggaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Solmadapar.

"Pemahaman kita harus jelas dan sama dulu. Kita jangan main tuduh. Belum tentu anggota DPRD yang berhasil memperjuangkan suatu pos anggaran adalah mafia anggaran," ujarnya saat dimintai tanggapan.

Sebab, bisa jadi itu hasil perjuangan DPRD aspirasi

masyarakat, misalnya melalui mekanisme reses. Meskipun begitu, ia menyambut positif jika Solmadapar dapat membuktikan adanya praktik mafia anggaran di tingkat provinsi.

Di sisi lain, Ary sepakat dengan Solmadapar bahwa hasil temuan BPK perlu ditindaklanjuti. Bahkan, ia menyarankan dibentuknya Badan Akuntabilitas yang memantau tindak lanjut temuan tersebut setelah masa kerja Pansus DPRD tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selesai.

Sebab, selama ini, masa kerja Pansus sangat terbatas dan DPRD pun tidak dapat terus-menerus memantau hasil tindak lanjut dari temuan BPK.

Badan Akuntabilitas dapat beranggotakan personel dari sekretariat dewan yang secara periodik melapor kepada DPRD. "Misalnya tindak lanjut ganti rugi keuangan negara. Sudah sampai di mana prosesnya, Badan Akuntabilitas bisa memantau," katanya. (ron)